

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU DI KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh : Maironi Kartika

Pembimbing: Geovani Meiwanda, S.Sos., MPA

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aims to find out and describe how the implementation of fisheries business policies through the program of fostering and supervising capture fisheries business permits from the Maritime Affairs and Fisheries Service of the Riau Province in Bengkalis Regency, knowing the supporting and inhibiting factors and the efforts made by the government to overcome the obstacles that occur. This study uses a qualitative research method where data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The theory used is the policy implementation model according to Merrile Grindle in Leo Agustino. The results showed that the implementation of fisheries business policies through the program of fostering and supervising capture fisheries business permits in Bengkalis Regency has not gone well due to the low mindset of fishermen, budget constraints, lack of coordination in program implementation, the presence of individuals or parties who take personal advantage, limitations in the use of fishing gear and fishing areas with the issuance of Riau Province Regional Regulation number 5 of 2017, there is no fish shelter (TPI) available for fishermen and there is competition from local fishermen against fishermen from outside the area.

Keywords: implementation, policy, fishery business, program for fostering and supervising capture fisheries.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku secara efektif pada Oktober 2016, kewenangan daerah khususnya provinsi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya semakin luas. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan yang lebih besar, termasuk dalam hal pengelolaan perikanan, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan perikanan sampai dengan 12 mil dimana sebelumnya dari 4 – 12 mil.

Beralihnya kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota ke pemerintah provinsi tidak serta merta menyelesaikan masalah di bidang kelautan, hal ini justru semakin menambah permasalahan terutama di bidang pengawasan yang belum sepenuhnya dapat di atasi oleh pemerintah provinsi. Masalah-masalah di bidang pengawasan ini umumnya terjadi di karenakan adanya pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan, serta penggunaan alat penangkapan yang telah dilarang oleh pemerintah.

Sektor kelautan dan perikanan kini mulai mendapatkan perhatian khusus, namun dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang, ditandai dengan adanya penurunan produksi perikanan dan rendahnya kesejahteraan nelayan sebagai produsen perikanan, diantaranya adalah pelanggaran alih muatan kapal di tengah laut, aturan moratorium kapal besar, dan penenggelaman kapal illegal.

Perairan laut mempunyai potensi yang cukup besar dalam sub sektor perikanan, baik sumber hayati maupun non hayati. Sumber daya ikan sebagai

salah satu sumber penghidupan dan pembangunan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian dalam pemanfaatannya sehingga sumberdaya tersebut tetap lestari antara lain melalui pengaturan dalam pemberian izin. Pemerintah telah mengatur kewenangan pemberian izin di bidang pelayanan perizinan yang berkaitan dengan usaha perikanan. Perizinan merupakan instrumen pengendalian kegiatan usaha penangkapan ikan untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan, yakni menjaga sumberdaya ikan agar tetap lestari dan tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan adalah melalui pengaturan perizinan perikanan tangkap. Disamping sebagai upaya pemanfaatan sumber daya ikan, pengaturan perizinan perikanan tangkap juga dimaksudkan untuk menggali potensi pendapatan daerah melalui retribusi bidang penangkapan ikan. Retribusi bidang penangkapan ikan merupakan penerimaan daerah bukan pajak yang terdiri dari retribusi alat tangkap dan retribusi pengangkutan ikan. Dasar pengenaan retribusi penangkapan ikan adalah jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan.

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di Provinsi Riau wajib memiliki Izin Usaha Perikanan Tangkap, salah satu nya seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan, kelompok atau perorangan dalam melakukan

kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan alat- alat produksi yang tercantum dalam izin tersebut dan telah disahkan oleh Undang-Undang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah penulis jabarkan sebelumnya maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan pembinaan dan pengawasan izin usaha perikanan tangkap dinas kelautan dan perikanan provinsi riau di kabupaten bengkalis?
2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan pembinaan dan pengawasan izin usaha perikanan tangkap dinas kelautan dan perikanan provinsi riau di kabupaten bengkalis?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan pembinaan dan pengawasan izin usaha perikanan tangkap dinas kelautan dan perikanan provinsi riau di kabupaten bengkalis
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan izin usaha perikanan tangkap dinas kelautan dan perikanan provinsi riau di kabupaten bengkalis.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan sendiri sangat beragam, namun pada intinya sama yaitu sebuah pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang harus diambil dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Dya (Suratman 2017:12) public policy is whatever government choose to do or not to do. Kebijakan publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri utama kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik.

Definisi-definisi tersebut dapat dibuat rumusan pemahaman tentang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau administratur publik. Jadi, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah.

Kebijakan publik juga bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat serta memanifestasikan kesejahteraan masyarakat, selain itu kebijakan publik berfungsi sebagai alat kontrol di masyarakat, dan sebagai alat untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik selalu mengandung multifungsi untuk menjadikan kebijakan itu adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Meskipun pemahaman ini penting, namun hal yang lebih penting bagi pemerintah atau lembaga publik adalah perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Dalam membuat kebijakan publik sangat dibutuhkan sebuah model. Model digunakan karena adanya eksistensi masalah publik yang kompleks. Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep/teori, diagram, grafik atau persamaan matematis. Ada beberapa model terpilih dalam kebijakan publik, diantaranya adalah model institusional, model elit-massa, model inkremental, model kelompok, model sistem politik, model rasional, model proses, dan model pilihan publik.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dari dalam negeri, maupun dengan menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan.

Grindle (Winarno, 2011: 149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya '*a policy delivery system*', dimana sarana-sarana tertentu dirancang

dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.

Penulis akan menggunakan model implementasi yang disampaikan oleh Grindle sebagai kerangka analisis implementasi kebijakan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa menurut Grindle, isi kebijakan dan konteks implementasi mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan. Karena penulis ingin melihat lebih jauh dari faktor isi kebijakan dan faktor lingkungan kebijakan apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan perizinan usaha perikanan tangkap dinas kelautan dan perikanan provinsi riau.

Merrile Grindle dalam Leo Agustino (2014:139) menyebutkan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Berdasarkan pernyataan tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang menyangkut 3 hal penting yaitu, atas dasar adanya tujuan dan sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan, dan adanya hasil dari suatu kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahap implementasi kebijakan terdapat berbagai faktor yang menjadi penentu keberhasilan dari suatu

kebijakan. Model Implementasi Merilee S. Grindle merupakan model dengan pendekatan top-down, dimana menurut Grindle ada dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik (Agustino, 2012:154). Dua faktor tersebut dapat menjadi pendukung maupun penghambat pada implementasi kebijakan. Kedua faktor tersebut adalah faktor isi kebijakan dan faktor lingkungan kebijakan.

Faktor isi kebijakan terdiri dari:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, menjelaskan bahwa jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan, merupakan manfaat yang diterima oleh masyarakat atau target group, disini menjelaskan apakah manfaat yang diterima oleh masyarakat telah sesuai dengan kebutuhannya atau justru manfaat yang diterima tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

3. Derajat perubahan yang diinginkan, merupakan sejauh mana perubahan yang dirasa didapat dari suatu kebijakan.

4. Kedudukan pembuat kebijakan, menjelaskan mengenai ketepatan suatu kebijakan yang diimplementasikan ini apakah sudah tepat dengan lokasi dan apakah kebutuhan sudah menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat.

5. Siapa pelaksana kebijakan. Dalam suatu kebijakan harus tepat dalam memilih implementor. Implementor haruslah memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya, serta penyebutan implementor harus dijelaskan secara rinci.

6. Sumber daya yang dikerahkan. Implementasi sebuah kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang

memadai, sumber daya yang dimaksud bukan hanya sumber daya manusia tetapi juga sumber daya financial.

Faktor lingkungan kebijakan terdiri dari:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. menjelaskan bahwa strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa, menjelaskan bahwa lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan itu sendiri. Strategi penyelesaian konflik secara tidak langsung menilai ciri-ciri dari lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

3. Kepatuhan dan daya tanggap.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini yang bersifat deskriptif penelitian dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait suatu fenomena sosial yang diteliti kemudian dapat digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, yang beralamat di Jl. Pattimura No. 6, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28127. Pemilihan lokasi ini di latar belakang oleh karna Dinas Kelautan dan Perikanan ini dapat melakukan program pembinaan dan pengawalan meliputi pengelolaan usaha, pengelolaan sarana, dan prasarana, teknik penangkapan ikan, mutu ikan

diatas kapal, kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan, dan tata cara pembuatan surat izin.

Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok orang yang memberikan informasi terhadap suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam. Informan dalam hal ini adalah orang yang pelanggan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan informan penelitian yaitu metode *Purpose Sampling*.

Menurut **Sugiyono (2010:85)** *Purpose Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain, *Purpose Sampling* yaitu salah satu teknik sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berikut adalah informan yang dibutuhkan dalam penelitian :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
4. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
5. Masyarakat (Kelompok Usaha Bersama dan Nelayan)

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan

menggunakan Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara peneliti lakukan kepada para informan yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya dokumentasi yang dilakukan dalam bentuk foto bukti wawancara dengan informan serta foto sejumlah data seperti struktur organisasi, dan sebagainya.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung ditanyakan kepada narasumber yaitu stakeholders yang terlibat dalam penetapan strategi mengatasi tunggakan tersebut. Data tersebut didapat dengan wawancara dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Hal ini untuk lebih mendapatkan hasil yang lebih relevan lagi demi kelengkapan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dengan adanya media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber data sekunder yakni informasi yang didapat membantu dalam penyelesaian penelitian tersebut. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung data primer biasanya berupa buku, jurnal, artikel, undang-undang dan sumber lainnya. Data sekunder penelitian ini adalah :

Jumlah

- a. Jumlah Produksi Perikanan di Provinsi Riau Pada Tahun 2016-2017 (Ton)
- b. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Riau Pada Tahun 2018-2022 (Ton).

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari informan penulis menggunakan metode interaktif. Analisis data dilakukan ketika data dari informan ataupun sumber lainnya yang telah didapatkan.

Teknik analisis data menurut **Miles dan Huberman (1992)** dalam **Moeloeng (2010)** adalah :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan perlu dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Sebelum melakukan reduksi data peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu yang mana dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan observasi kelapangan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau). Reduksi data dalam penelitian ini adalah data jumlah Jumlah Produksi Perikanan di Provinsi Riau Pada Tahun 2016-2017 (Ton), data Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Riau Pada Tahun 2016-2017 (Ton), dari

data-data tersebut direduksi atau dirangkum data yang berkaitan dengan fokus pada Implementasi Kebijakan Perikanan Usaha Perikanan tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan Provnsi Riau (Studi Kasus Perda Provnsi Riau Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 30).

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi atau dirangkum, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data berupa naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini mengenai implementasi kebijakan izin usaha perikanan tangkap dinas kelautan dan perikanan provinsi riau (studi kasus perda provinsi riau nomor 5 tahun 2017 pasal 30). Penulis menggunakan metode kualitatif *participatory rural appraisal (PRA)* metode ini yang merupakan salah satu metode yang sering diterapkan dalam program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori menurut Merrile Grindle dalam Leo Agustino (2014:139) untuk menganalisis implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan izin usaha perikanan tangkap dinas kelautan dan perikanan provinsi riau di

kabupaten bengkalis yang terdiri dari beberapa indicator yaitu Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Jenis manfaat yang dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, Kedudukan pembuat kebijakan, Siapa pelaksana kebijakan, Sumber daya yang dikerahkan. setiap indicator dijelaskan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh penulis dari setiap informan penelitian yang kemudian di analisis dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan izin usaha perikanan tangkap dinas kelautan dan perikanan provinsi riau di kabupaten bengkalis.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dapat diberikan kesimpulan Proses Implementasi kebijakan perizinan perikanan tangkap di Kabupaten Pematang yang meliputi persyaratan perizinan, prosedur pelayanan dan jaminan pelayanan telah dilakukan secara optimal. Faktor-faktor yang peneliti temukan adalah Pertama, saat para nelayan ingin mengurus keperluan ingin membuat SIPI harus menempuh jarak yang jauh untuk dapat sampai ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Kedua, Penulis mendapati bahwa para nelayan juga memiliki sikap yang dan tidak mahu tahu dan tidak ingin repot untuk mengurus SIPI, sehingga para nelayan juga sering menggunakan jasa para calo, Ketiga, penulis juga mendapati bahwa kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang bekerja turun ke lapangan untuk bisa mengecek dan meninjau langsung kondisi dari kapal para nelayan

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zaenal. 2012. *Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Humanika.
- Diah Siti Utari, 2022, *Implementasi program pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan desa teluk bakau kecamatan dunung kijang kabupaten bintang*
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, yoogyakarta
- Hilman Malik, 2018, *Implementasi Kebijakan Usaha Perikanan Melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau*
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Michael Mamentu, 2015, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Di Kota Manado (Studi Terhadap Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara)*
- Muhammad Arfan, 2017, *Implementasi Kebijakan Perizinan Tangkap Di Kabupaten Pematang*

- Moelong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian kualitatif (Cet. 13)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara - Negara Berkembang*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pearce, Jonh A & Richard B. Robinson Jr. 2012. *Manajemen Srategis: formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Jakarta: Salemba Empat
- Rizki Mulli Ranto, 2021, *Implementasi kebijakan menteri kelautan dan perikanan Nomor 71/permen-kp/2016 tentang alat tangkap purse seine di ppn sibolga provinsi sumatera utara*
- Sutopo, H.B. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung-puslit KP2Wlemlit Unpad. Bandung.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.Yogyakarta: Caps.